

## PELATIHAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT DUSUN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RPJM DESA KEPADA PERANGKAT DESA, BPD DAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

**Haris Fauzi\*, Asep Qustolani, R. Neny Kusumadewi**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka, Indonesia

\*e-mail Korespondensi: [harisfauzi@unma.ac.id](mailto:harisfauzi@unma.ac.id)

### **Abstract**

*The Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) is an elaboration of the vision and mission for the village in the welfare of village communities. The Government of Kulur Village, Majalengka sub-district, Majalengka Regency experienced problems in implementing planning meetings at the hamlet level as a reference for planning at the Village level. Other problems in preparing the RPJMDes were due to the unavailability of up-to-date village profile data and a lack of awareness of the importance of the planning document and the insufficient capacity of the tools villages in preparing the RPJMDes. This community service program aims to strengthen the capacity of the village government, BPD and the drafters of the Kulur Village RPJMDes through training in the implementation of development planning and training in preparing the Village RPJMDes. This program is carried out in the form of training and mentoring. The result of this activity is an increase in the understanding of village officials, the BPD and the RPJMDes drafting team in carrying out planning at the hamlet level and also in preparing the RPJMDes. The target achievement of this activity is the realization of the independence of village officials, the BPD and the RPJMDes drafting team in carrying out planning and preparing the RPJMDesa in the future.*

**Keywords:** *village development plan; preparation of RPJMDesa.*

### **Abstrak**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi kepada desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Pemerintah <sup>Desa</sup> Kulur kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka mengalami permasalahan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat dusun sebagai acuan untuk perencanaan di tingkat Desa, Permasalahan lainnya dalam penyusunan RPJMDes karena tidak tersedianya data profil desa terkini dan kurangnya kesadaran betapa pentingnya dokumen perencanaan tersebut dan kurang memadainya kemampuan perangkat desa dalam menyusun RPJMDes. Program pengabdian ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas pemerintahan Desa, BPD dan Penyusun RPJMDesaKulur melalui pelatihan pelaksanaan perencanaan pembangunandan pelatihan penyusunan RPJMDes. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Hasil kegiatan ini berupa meningkatnya pemahaman perangkat desa, BPD dan Tim penyusun RPJMDesa dalam melaksanakan perencanaan di tingkat dusun dan juga penyusunan RPJMDes. Target capaian kegiatan ini adalah terwujudnya kemandirian perangkat desa, BPD dan Tim penyusun RPJMDesa dalam melaksanakan perencanaan dan menyusun RPJMDesa di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** rencana pembangunan desa; penyusunan RPJMDesa

Accepted: 2023-09-19

Published: 2023-10-23

## PENDAHULUAN

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Dengan kata lain, pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dalam dua konteks, yakni yang pertama adalah masyarakat itu yang selalu berubah, dan kedua bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana. Orientasi pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat terkandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek

pembangunan. Sebagai subjek pembangunan berarti rakyat didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan.

Abe, Alexander, 2002, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi dalam pembangunan desa dilihat dari dua hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat.
2. Program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat desa dan segenap warga dalam rangka memperkecil hambatan dalam program.
3. Program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan.
4. Selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal.
5. Tidak perlu bersikap superior atau "merasa paling tahu" dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja
6. Tidak perlu memberikan janji kepada siapapun tetapi kesungguhan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program telah selesai dikerjakan). Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga Negara sebagai objek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari. Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja, aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan. Dalam partisipasi yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban. Kapital sosial merupakan wahana yang memungkinkan terjadinya pertukaran itu. Pertukaran akan semakin sering bila pertukaran tersebut mengakibatkan pemenuhan hak seimbang dengan pelaksanaan kewajiban yang akan mempengaruhi frekuensi pertukaran sosial. Partisipasi masyarakat juga akan ditentukan oleh perilaku masyarakat yaitu harapan mereka untuk memperoleh keuntungan/manfaat. Semakin besar manfaat yang diperoleh seseorang atas suatu kegiatan maka semakin tinggi tingkat partisipasinya (Adisasmita, Raharjo. 2006) Jadi agar partisipasi warga makin meningkat dalam kegiatankegiatan atau program pembangunan maka harus dijamin adanya pertukaran yang adil.

Menurut Tjokromidjojo, Bintoro, 2006, bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah yakni untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Perencanaan pembangunan desa peranannya sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah kesejahteraan

masyarakat desa diarahkan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga inilah yang menjembatani masyarakat dengan pemerintahannya. Di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Keikutsertaan masyarakat merupakan wujud partisipasi dan juga sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di desanya. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dengan begitu, arah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, setiap individu dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Langkah 1 (Metode Ceramah):**

Peserta diberikan wawasan mengenai pentingnya melaksanakan siklus perencanaan yang benar. Langkah pertama diselenggarakan melalui metode ceramah selama 1,5 jam.

### **2. Langkah 2 (Metode Tutorial):**

Peserta pelatihan diberikan materi tentang penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Materi ini disampaikan dalam bentuk tutorial disertai. Langkah kedua diselenggarakan selama 5 jam.

### **3. Langkah 3 (Metode Diskusi):**

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan potensi dan masalah yang ada di Desa, ataupun hal-hal yang ingin mereka tanyakan masalah perencanaan pembangunan. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1,5 jam.

Disamping langkah 1, 2, dan 3 diatas, akan dilakukan kegiatan pendampingan mempraktekan penggalan gagasan di tingkat basis dengan menggunakan alat kalender musim, sketsa desa dan diagram venn selama 8 jam dengan jadwal menyesuaikan peserta khalayak sasaran sehingga jumlah jam pengabdian masyarakat terpenuhi 16 jam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini mengemukakan gambaran umum lokasi dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan ini dilakukan Dengan menggunakan metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini merupakan pengabdian

dalam rangka menumbuhkan kesadaran kepada perangkat Desa, BPD dan tim penyusun RPJMDesa di Desa Kulur, bahwa suatu pembangunan atau sukses dan tidaknya pembangunan itu berawal dari sebuah perencanaan yang benar, Untuk memahami hubungan antara perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi lokasi kegiatan pelatihan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Dusun dan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Kepada Perangkat Desa, BPD dan Tim Penyusun RPJM Desa adalah Di Lingkungan Pemerintahan Desa Kulur, Kec/Kab Majalengka.

Pelatihan ini diikuti oleh 23 peserta dari Berbagai Unsur yaitu terdiri dari kepala Desa, aparat Desa, BPD dan tim Penyusun RPJMDesa di lingkungan Pemerintahan Desa Kulur, Kec/Kab Majalengka.

### Capaian Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil survey dan konsultasi dengan Kepala Desa di Desa Kulur, maka pada tanggal 18 Mei 2021 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pelatihan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Dusun dan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Kepada Perangkat Desa, BPD dan Tim Penyusun RPJM Desa, dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman para Perangkat Desa dan Tim penyusun RPJMDesa dalam pembuatan dokumen RPJMDesa.

Peserta pelatihan pada tahap awal (sesi I), diberikan materi tentang bagaimana melakukan siklus perencanaan yang dimulai dari tingkat dusun, alat apa yang dipakai untuk alat menggali potensi dan masalah, Peserta pada tahap kedua (sesi II) diberikan pelatihan Penyusunan RPJMDesa dengan langsung mempraktekannya pembuatan dokumen perencanaan Desa, dan pada sesi ke III peserta langsung di beri kesempatan diskusi pengalihan potensidan masalah yang ada di tiap Blok. Serta langsung pada tap akhir langsung penggalan gagasan dengan menggunakan alat sketsa Desa, Kalender musim dan diagram ven selama 8 jam. Sedangkan hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program kegiatan pengabdian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kesadaran dan Pengetahuan dari para Perangkat Desa, BPD dan tim penyusun RPJMDesa di lingkungan Pemerintahan Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.
- b) b. Tingkat pengetahuan dan pemahaman para Peserta Tim penyusun, BPD dan perangkat Desa diukur dengan partisipasi yang lebih baik dari biasanya.

Berdasarkan data di lapangan nampak bahwa para peserta kegiatan pelatihan sangat memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan serta diskusi.



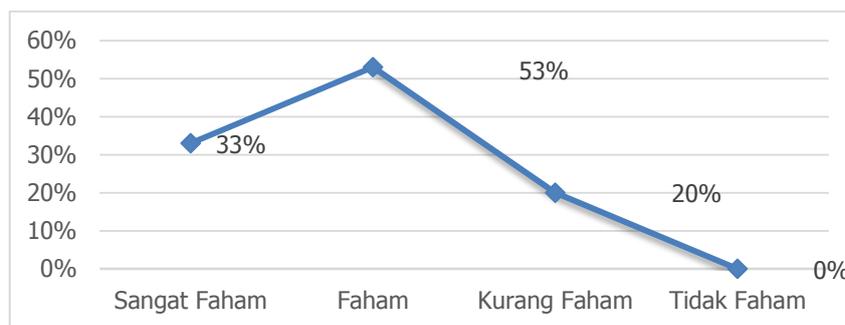
Gambar 1 Sebelum Pelatihan



Gambar 2 Ceramah dan Tutorial Pembukuan Usaha

1. Respon Peserta Terhadap Materi Pelatihan

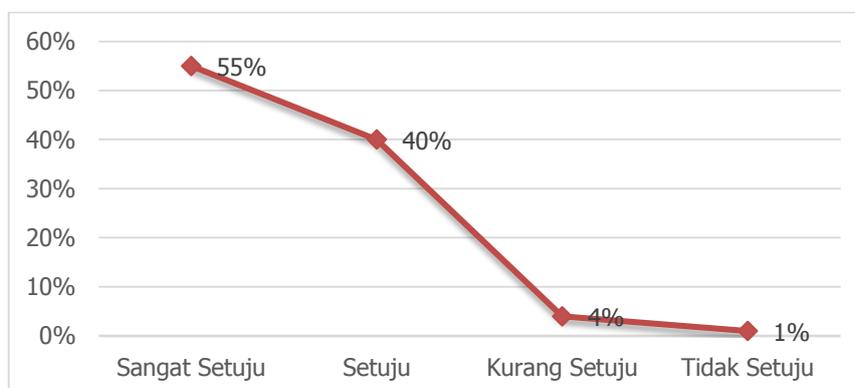
Persentase respon peserta terhadap materi pelatihan menunjukkan sebagian besar Faham dengan materi pelatihan sebesar 53%, bahkan ada responden yang memilih sangat faham sebesar 33%, sisanya responden menjawab kurang faham 20%, dan tidak faham 0%. Persentase respon peserta terhadap materi dapat digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 3 Respon Peserta Terhadap Materi Pelatihan

Grafik pada gambar di atas menunjukkan bahwa respon peserta yang mengerti terhadap materi pelatihan mempunyai respon positif yang karena banyak memilih jawaban faham dan sangat faham. Berdasarkan persentasi responden yang tinggi pada alternatif jawaban faham dan sangat faham maka dapat disimpulkan bahwa materi yang dipaparkan saat pelatihan berkategori sudah sangat baik.

2. Respon Peserta Terhadap Metode Pelatihan



Gambar 4 Respon Peserta Terhadap Metode Pelatihan

Metode pelatihan yang digunakan pada pelatihan ini adalah ceramah dan praktik. Respon peserta terhadap metode pelatihan yang digunakan sebagian besar menjawab sangat setuju sebesar 55%, responden yang memilih alternatif jawaban setuju sebesar 40%, sedangkan sisanya memilih alternatif jawaban kurang setuju 4% dan tidak setuju 2%. Persentase respon peserta terhadap metode pelatihan dapat dilihat di gambar 4.

Pada gambar 4 menunjukkan bahwa respon peserta terhadap metode pelatihan mempunyai respon positif karena banyak yang memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Berdasarkan persentase responden yang tinggi pada alternatif jawaban sangat setuju dan setuju, maka dapat disimpulkan bahwa metode pelatihan yang digunakan saat pelatihan berkategori sudah sangat baik.

## KESIMPULAN

Perangkat Desa, BPD dan Tim penyusun RPJMDesa di lingkungan Pemerintahan Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka memiliki kemampuan menyusun Dokumen perencanaan.

Hasil kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi Perangkat Desa, BPD dan Tim penyusun RPJMDesa di lingkungan Pemerintahan Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, untuk dapat menyusun Dokumen perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan PeDesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- C.Maxwell, John. 2001. *Developing the Leader Within You Workbook*. New York: Injoy, Inc.
- Fitriastuti, NurwiMayasri, 2005, *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*, Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Tjokromidjojo, Bintoro, 2005. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Mas Agung.
- Michael, Todaro, 1977, *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta..